



LAPORAN VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

**MEMBANGUN DAYA SAING GLOBAL MELALUI TRANSFORMASI TATA KELOLA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PESAWARAN**

*(Sub Tema: Tranformasi Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Memperkuat
Ketahanan Ekonomi Nasional)*

NAMA : FERI HADIANSYAH, S.T., M.M., M.T.
NDH : 31
INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. OKU Timur

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN V
TAHUN 2026**

A. Latar Belakang

Kabupaten Pesawaran menyimpan potensi pariwisata yang strategis: 125 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), garis pantai sepanjang ± 120 km, lebih dari 40 pulau, dan posisi sebagai hinterland Kota Bandar Lampung yang terhubung langsung dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Di atas fondasi ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) berbasis konsep *Eco-Marine Integrated Tourism* sebagai instrumen untuk membangun daya saing global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat daerah.

Transformasi tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang dijalankan menuntut kesiapan seluruh ekosistem pendukung, termasuk kualitas lingkungan kawasan wisata. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah wisata masih bersifat parsial dan belum terpadu: tidak ada sistem yang mengintegrasikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas dalam satu kerangka tata kelola yang kohesif. Akibatnya, pencemaran sampah di kawasan pesisir dan destinasi wisata terus menjadi titik lemah yang menggerus kualitas destinasi, menurunkan kepuasan wisatawan, dan mengancam keberlanjutan investasi pariwisata yang sedang dibangun.

Dari perspektif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur, isu tersebut memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan transformasi tata kelola pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan persampahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Profil Singkat Lokus

Kabupaten Pesawaran adalah daerah di Provinsi Lampung dengan luas $\pm 1.278,18$ km², jumlah penduduk 507.656 jiwa (2025) yang tersebar di 11 kecamatan. Secara strategis, kabupaten ini berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) dan berfungsi sebagai wilayah penyangga Kota Bandar Lampung, sehingga memiliki daya ungkit tinggi bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung mencapai rata-rata 31% per tahun, dengan total perjalanan mencapai sekitar 27 juta pada tahun 2025.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran tengah mengembangkan pendekatan KWT *Eco-Marine Integrated Tourism* yang mengintegrasikan destinasi, investasi, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi tantangan nyata: infrastruktur persampahan di kawasan wisata terutama di wilayah kepulauan sangat terbatas. Belum ada Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) terpilah di titik wisata utama, armada

pengangkut sampah laut minim, dan belum terbentuk sistem pengelolaan berbasis komunitas yang terstandarisasi. Kesenjangan antara ambisi transformasi pariwisata dengan kapasitas pengelolaan lingkungan inilah yang menjadi lokus persoalan strategis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur dan investasi, tetapi juga penguatan tata kelola lingkungan hidup sebagai faktor penentu keberlanjutan destinasi wisata.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama visitasi, isu strategis yang ditemukan adalah belum optimalnya integrasi tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut ditunjukkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat dalam satu ekosistem pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Potensi ekonomi kreatif lokal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber nilai tambah destinasi wisata sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
3. Promosi dan pemasaran destinasi wisata belum terintegrasi secara optimal dengan produk ekonomi kreatif unggulan daerah, baik melalui platform digital maupun kegiatan promosi daerah.
4. Kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan produk yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar wisata.
5. Pengembangan pariwisata berkelanjutan masih memerlukan penguatan tata kelola lingkungan sebagai faktor pendukung dalam menjaga kualitas dan daya saing destinasi wisata.

D. Potensi Daerah

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara terpadu. Selain memiliki 125 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), wilayah pesisir dan kepulauan yang menarik, serta aksesibilitas yang semakin baik, Pesawaran

juga memiliki kekayaan budaya, kearifan lokal, dan produk masyarakat yang berpotensi menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi kreatif.

Keberadaan UMKM, desa wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku seni budaya, industri kuliner, kerajinan tangan, fotografi, dan konten kreatif digital merupakan modal penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata yang bernilai tambah. Potensi tersebut semakin diperkuat oleh budaya Andan Jejama yang mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi masyarakat.

Melalui pendekatan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) berbasis *Eco-Marine Integrated Tourism*, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diintegrasikan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional.

E. Strategi Marketing

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, strategi pemasaran perlu dibangun secara terpadu antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui:

1. Penguatan branding Kabupaten Pesawaran sebagai destinasi *Eco-Marine Integrated Tourism* yang mengedepankan keindahan alam, budaya lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
2. Pengembangan promosi digital yang mengintegrasikan destinasi wisata dengan produk ekonomi kreatif unggulan daerah melalui media sosial, marketplace, dan platform pariwisata digital.
3. Penyelenggaraan festival budaya, pameran UMKM, dan event ekonomi kreatif sebagai sarana promosi daerah sekaligus peningkatan kunjungan wisatawan.
4. Pengembangan paket wisata berbasis pengalaman (*experience tourism*) yang melibatkan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat lokal.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan produk wisata melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan pengalaman wisata yang berkesan dan berdaya saing.

F. Diagnosa

Akar masalah dapat didiagnosa pada tiga dimensi utama antara lain :

1. Dimensi kelembagaan, yaitu transformasi tata kelola pariwisata yang sedang berjalan belum sepenuhnya diimbangi dengan reformasi tata kelola lingkungan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Dinas Lingkungan Hidup masih beroperasi secara sektoral dan belum diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengembangan Kawasan Wisata

Terpadu, sementara koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif juga belum berjalan optimal.

2. Dimensi regulasi dan insentif, yaitu belum adanya kebijakan daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah wisata secara terpadu serta mendorong penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Akibatnya, sampah masih dipandang sebagai beban lingkungan dan belum dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3. Dimensi kapasitas, yaitu keterbatasan anggaran, SDM, dan infrastruktur pengelolaan sampah yang menyebabkan pelayanan lingkungan belum mampu mengimbangi pertumbuhan sektor pariwisata. Pada saat yang sama, kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM dalam mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis lingkungan juga masih terbatas sehingga peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal.

Apabila kondisi ini tidak segera ditangani secara sistemik, maka bukan hanya kualitas lingkungan dan reputasi destinasi wisata yang terdampak, tetapi juga hilangnya peluang pengembangan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

G. Lesson Learned

Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran memberikan pembelajaran penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur yaitu:

- Lingkungan adalah prasyarat daya saing, bukan variabel sekunder. Visi *Eco-Marine Integrated Tourism* tidak akan terwujud tanpa ekosistem lingkungan yang sehat. Pengelolaan lingkungan harus menjadi pilar utama dalam transformasi tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif karena kualitas lingkungan menentukan daya tarik destinasi, kenyamanan wisatawan, serta nilai jual produk dan layanan ekonomi kreatif yang berkembang di daerah.
- Pemimpin Dinas Lingkungan Hidup harus bertransformasi dari manajer teknis menjadi pemimpin strategis. Isu lingkungan perlu diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah karena keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi faktor pendukung pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

- Kolaborasi lintas sektor adalah keniscayaan, bukan pilihan. Ketahanan ekonomi nasional yang dibangun dari daerah hanya dapat dicapai apabila sektor lingkungan hidup, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dunia usaha, dan masyarakat bekerja dalam satu ekosistem tata kelola yang terintegrasi sehingga tercipta nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
- Modal sosial lokal merupakan aset pembangunan yang sangat strategis. Nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tercermin dalam konsep Andan Jejama menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas tidak hanya efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi penggerak utama pengembangan desa wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
- Regulasi yang tepat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang mengatur tanggung jawab, insentif, dan mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan sampah serta pengembangan ekonomi sirkular, transformasi tata kelola lingkungan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tidak akan berjalan secara optimal. Kerangka hukum diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem dan kepastian peran seluruh pemangku kepentingan.
- Ekonomi sirkular merupakan jembatan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Pengalaman di Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa sampah tidak hanya dapat dipandang sebagai permasalahan lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk kreatif, kerajinan, souvenir, pupuk organik, maupun produk bernilai ekonomi lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diimplementasikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur, antara lain:

1. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui kegiatan:

- Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Sampah Daerah yang melibatkan DLH, kecamatan, desa, sekolah, pelaku usaha, komunitas, serta perwakilan UMKM dan ekonomi kreatif.
- Penyusunan SOP terpadu pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga TPA.
- Program "Desa Bersih Terintegrasi" berbasis pendampingan lintas OPD.
- Penguatan sinergi antara program lingkungan hidup dengan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Pengembangan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan:

- Pembentukan dan revitalisasi Bank Sampah Unit di desa/kelurahan.

- Pelatihan pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah organik.
- Pembentukan kelompok swadaya masyarakat peduli lingkungan.
- Program lomba kampung bersih dan pengurangan sampah plastik.
- Pengembangan kelompok usaha berbasis daur ulang untuk menghasilkan produk kerajinan dan produk kreatif bernilai ekonomi.

3. Penguatan regulasi dan kebijakan daerah melalui kegiatan:

- Penyusunan/perubahan Perbup atau Perda tentang pengurangan sampah dan ekonomi sirkular.
- Penyusunan kebijakan kewajiban pemilahan sampah di kantor, sekolah, pasar, dan usaha.
- Penyusunan roadmap pengurangan sampah daerah.
- Sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan hasil pengolahan sampah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif daerah.

4. Pengembangan skema ekonomi sirkular melalui kegiatan:

- Pembangunan pilot project pengolahan sampah organik menjadi briket biomassa, kompos, maggot, dan pupuk cair organik.
- Kerja sama dengan UMKM, BUMDes, dan komunitas kreatif untuk pemasaran produk hasil olahan sampah.
- Program "Sampah Jadi Rupiah" berbasis insentif masyarakat.
- Penyediaan rumah produksi atau pusat pengolahan sampah terpadu.
- Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis bahan daur ulang yang memiliki nilai jual dan dapat menjadi produk unggulan daerah.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui kegiatan:

- Pelatihan teknis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular bagi ASN, perangkat desa, dan masyarakat.
- Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis lingkungan.
- Studi tiru ke daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Sertifikasi kompetensi pengelola lingkungan hidup.
- Digitalisasi data persampahan berbasis aplikasi/dashboard.